

ABSTRAK

Latar Belakang: Filisida neonatal di Indonesia sebagian besar melibatkan ibu dengan kehamilan tidak diinginkan. Kendala akses layanan kesehatan reproduksi serta stigma sosial yang kuat terhadap kehamilan di luar nikah berkontribusi pada tingginya risiko kasus tidak dilaporkan. Pemeriksaan forensik, khususnya *visum et repertum*, merupakan elemen utama dalam pembuktian mekanisme kekerasan, namun autopsi yang seharusnya menjadi prosedur baku belum dilakukan secara konsisten. **Tujuan:** Menganalisis pola penyebab kematian, distribusi cedera, serta kontribusi *visum et repertum* dalam proses pembuktian hukum pada kasus filisida yang diputus Mahkamah Agung. **Metode:** Penelitian ini merupakan studi dokumen melalui telaah terhadap 43 putusan Mahkamah Agung Indonesia terkait filisida. Data yang dianalisis meliputi karakteristik pelaku dan korban, penyebab kematian, temuan trauma, serta penerapan pasal hukum. **Hasil:** Pelaku didominasi perempuan (93,6%), dengan usia rata-rata $25,4 \pm 7,8$ tahun dan mayoritas belum menikah. Hampir seluruh korban adalah bayi baru lahir (95,7%) dan motif terbanyak adalah anak tidak diinginkan (89,3%). Penyebab kematian terbanyak adalah asfiksia (32%), disusul eksanguinasi (13%), dan trauma tumpul (11%). Mayoritas trauma ditemukan pada area maksilofasial (33%) dan servikal (25%), yang diidentifikasi melalui pemeriksaan luar. Namun, autopsi hanya dilakukan pada sepertiga kasus, sehingga potensi cedera internal terlewatkan masih tinggi. Sebagian besar putusan mendasarkan pemidanaan pada Pasal 341 KUHP (74,5%) dan Pasal 342 KUHP (23,4%). **Kesimpulan:** Filisida di Indonesia berkaitan kuat dengan kerentanan sosial ibu pasca persalinan, terutama pada kehamilan tidak diinginkan. Ketergantungan pada pemeriksaan luar tanpa autopsi meningkatkan risiko kesalahan interpretasi penyebab kematian. Standarisasi pemeriksaan forensik melalui autopsi wajib pada kematian neonatal sangat diperlukan untuk memastikan akurasi diagnosis dan keadilan proses hukum.

Kata kunci: filisida, *visum et repertum*, trauma maksilofasial, Mahkamah Agung

ABSTRACT

Background: Filicide in Indonesia remains insufficiently documented, often associated with maternal vulnerability and limited psychosocial support. The absence of mandatory autopsy in legal practice may reduce the accuracy of determining the cause of death. **Objective:** To analyze the characteristics of filicide offenders and victims in Indonesia and evaluate forensic findings documented in *visum et repertum* used in court decisions. **Methods:** A cross-sectional document analysis was conducted using 43 Supreme Court decisions related to filicide. Extracted data included offender and victim demographics, cause of death, trauma distribution, and applied legal articles. **Results:** Most offenders were women (93.6%), predominantly unmarried young mothers (mean age 25.4 ± 7.8 years). Nearly all victims were newborns (95.7%), with unwanted pregnancy identified as the primary motive (89.3%). Asphyxia (32%) was the leading cause of death, followed by exsanguination (13%) and blunt force trauma (11%). The most frequent trauma locations were the maxillofacial (33%) and cervical (25%) regions, commonly detected through external examination. However, autopsy was performed in only one-third of the cases, indicating a high likelihood of missed internal injuries. Sentencing predominantly referred to Article 341 (74.5%) and Article 342 (23.4%) of the Indonesian Penal Code. **Conclusion:** Filicide in Indonesia typically involves neonates killed by young unmarried mothers in socially vulnerable contexts, with violence directed at the airway and facial region. Expanding forensic investigation — particularly mandatory autopsy — is essential to improve diagnostic accuracy and strengthen legal accountability.

Keywords: filicide, neonaticide, forensic medicine, *visum et repertum*